

2022

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Natuna



**Badan Pusat Statistik
Kabupaten Natuna**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Natuna

2022



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN NATUNA 2022

ISSN : 2827-833X

No. Publikasi : 21030.2324

Katalog : 4102002.2103

Ukuran Buku : 17,6 x 25 cm

Jumlah Halaman : xiii + 40 halaman

Naskah :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna

Penyunting :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna

Gambar Kulit :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna

Penerbit :

©Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna

Pencetak :

Rizky Mandiri

Sumber Ilustrasi:

canva.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna.

Tim Penyusun

Penanggung Jawab Teknis:
Wahyu Dwi Sugianto, S.ST, M.Si

Editor:
Lia Oktavera, S.ST

Penulis:
Lia Oktavera, S.ST
Neni Merieta Simanjuntak, A.Md

Gambar Kover:
Neni Merieta Simanjuntak, A.Md

Pengolah Data:
Lia Oktavera, S.ST
Neni Merieta Simanjuntak, A.Md

KATA PENGANTAR

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator capaian pembangunan kualitas hidup masyarakat yang disusun berdasarkan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator umur harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, sedangkan dimensi standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Tahun 2020-2021, Indonesia dilanda pandemi Covid-19. Hal ini mengakibatkan segala aspek pembangunan, pendidikan, dan perekonomian mengalami pertumbuhan yang negatif. Pada tahun 2022 merupakan masa transisi pandemi covid-19. Pada masa transisi ini, baik sektor perekonomian, pendidikan dan kesehatan telah menunjukkan pertumbuhan positif. Hal tersebut berdampak positif terhadap pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2022 IPM Kabupaten Natuna berada pada peringkat 4 di Provinsi Kepulauan Riau. Walau demikian, pemerintah setempat masih memiliki PR untuk mempertahankan capaian tersebut tentunya dengan program-program yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Semoga dengan diterbitkannya publikasi “Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Natuna 2022” dapat memberikan manfaat bagi semua kalangan yang berkepentingan, termasuk masyarakat pengguna data sebagai bahan rujukan. Ucapan terimakasih dan apresiasi kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan saran atas terbitnya publikasi ini

Ranai, September 2023
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Natuna



Wahyu Dwi Sugianto, SST, MSI

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I Pengukuran Pembangunan Manusia	1
1. 1. Perkembangan Pengukuran Pembangunan	3
1. 2. Mendefinisikan Pembangunan Manusia	4
1.3. Urgensi Pembangunan Manusia	4
1. 4. Dimensi dan Indikator Pembangunan Manusia.....	6
BAB II Pembangunan Manusia Di Tingkat Nasional	7
2.1. Pembangunan Manusia Indonesia di Masa Transisi Pandemi.....	9
2.2. Capaian Dimensi Umur Panjang dan Umur Sehat.....	10
2.3. Capaian Dimensi Pengetahuan.....	12
2.4. Capaian Dimensi Standar Hidup Layak	13
BAB III Pembangunan Manusia Di Kabupaten Natuna	15
3.1. Indeks Pembangunan Manusia di Natuna.....	17
3.2. Capaian Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat Natuna	18
3.3. Capaian Dimensi Pengetahuan Natuna.....	21
3.4. Capaian Dimensi Standar Hidup Layak Natuna	25
BAB IV Kesimpulan	32
Daftra Pustaka	37

<https://natunakab.bps.go.id>

Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 3.1. Jumlah Tenaga Kesehatan Natuna 2019-2022	21
Tabel L.1 Komoditi Kebutuhan Pokok sebagai Dasar Hitung Paritas Daya Beli/ Purchasing Power Parity (PPP)	37
Tabel L.2 Nilai Maksimum dan Minimum per Komponen	38

<https://natunakab.bps.go.id>

Daftar Gambar

	Halaman
Gambar 2.1 . Tren IPM Indonesia, 2010-2022	10
Gambar 2.2. Capaian dan Pertumbuhan UHH Indonesia, 2010-2022	11
Gambar 2.3. Capaian dan Pertumbuhan HLS Indonesia, 2010-2022	12
Gambar 2.4. Capaian dan Pertumbuhan RLS Indonesia, 2010-2022	13
Gambar 2.5. Capaian dan Pertumbuhan Pengeluaran Riil Perkapita Disesuaikan Indonesia, 2010-2022	14
Gambar 3.1. Capaian dan Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Natuna, 2010-2022	17
Gambar 3.2. Capaian dan Pertumbuhan Umur Harapan Hidup Natuna, 2010-2022	18
Gambar 3.3. Rumah tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak di Natuan, 2017-2022	19
Gambar 3.4. Rumah tangga yang Memiliki Fasilitas Buang Air Besar di Natuna, 2017-2022	19
Gambar 3.5. Persentase Wanita Pernah Kawin dengan Umur Kawin Pertama ≤ 16 Tahun di Natuna, 2018-2022	20
Gambar 3.6. Capaian dan Pertumbuhan Harapan Lama Sekolah (HLS) Natuna, 2010-2022	22
Gambar 3.7. Capaian dan Pertumbuhan Rata-Rata Lama Sekolah Natuna, 2010-2022	22
Gambar 3.8. Angka Partisipasi Sekolah (APS), 2018-2022	23
Gambar 3.9. Angka Partisipasi Kasar (APK) Natuna, 2018-2022	24
Gambar 3.10. Angka Partisipasi Murni (APM) Natuna, 2018-2022	24
Gambar 3.11. Capaian dan Pertumbuhan Pengeluaran Riil Per Kapita (PPP) yang Disesuaikan di Natuna, 2020-2022	25

Gambar 3.12.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Natuna, 2010-2022	26
Gambar 3.13.	Perkembangan Kemiskinan di Natuna, 2011-2022	26

<https://natunakab.bps.go.id>

Daftar Lampiran

	Halaman
Lampiran 1 . Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia, 2021-2022	31

<https://natunakab.bps.go.id>



BAB

1

**Pengukuran
Pembangunan Manusia**

Pengukuran Pembangunan Manusia

1. 1. Perkembangan Pengukuran Pembangunan

Konsep pembangunan manusia telah mengalami perubahan yang signifikan dari waktu ke waktu, dimulai dari pandangan kuno hingga pemikiran modern saat ini. Pada pandangan kuno, pembangunan manusia hanya berkonsentrasi pada pemenuhan kebutuhan fisik manusia seperti makanan, air, tempat tinggal, dan pakaian. Hal tersebut memiliki tujuan agar manusia dapat bertahan dan melanjutkan hidupnya (Sen, 1999). Pada abad pertengahan, pembangunan manusia lebih terfokus pada kemajuan spiritual dan moral dengan tujuan mencapai kehidupan yang lebih baik di akhirat (Alatas, 1977). Pada abad pencerahan, pembangunan manusia lebih condong pada kemajuan intelektual dengan tujuan menciptakan masyarakat yang lebih terdidik dan rasional. Pada abad modern awal, pembangunan manusia mulai terpusat pada kemajuan ekonomi dengan tujuan meningkatkan taraf hidup manusia (Sen, 1999). Namun, saat ini pembangunan manusia semakin berkembang dan memperluas pandangannya untuk mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas hidup manusia dalam semua aspek kehidupan, termasuk kesehatan, pendidikan, pekerjaan, akses terhadap sumber daya, dan keadilan sosial (UNDP, 2022).

Perkembangan pembangunan manusia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga oleh perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang di masyarakat. Revolusi industri yang membawa perubahan besar dalam cara manusia hidup dan bekerja, menjadi salah satu perubahan paling penting dalam sejarah pembangunan manusia. Perang dunia serta konflik internasional lainnya juga mempengaruhi perkembangan pembangunan manusia karena dampaknya terhadap kerusakan infrastruktur, hilangnya sumber daya, dan kerugian manusia lainnya. Sementara itu, globalisasi tidak hanya membuka pasar dan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi, tetapi juga dapat menyebabkan kesenjangan sosial ekonomi yang semakin besar antara negara-negara maju dan berkembang. Perubahan iklim juga berperan besar dalam perkembangan pembangunan manusia karena menimbulkan ancaman-ancaman yang mengarah pada keberlangsungan hidup manusia terutama dalam konteks sumber daya alam, kesehatan manusia, dan keamanan pangan (Beneria, 2016).

Sejarah pembangunan manusia menunjukkan bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi perkembangannya baik yang berdampak positif maupun negatif pada pembangunan manusia. Sementara itu, tantangan seperti ketimpangan ekonomi, perubahan iklim, konflik, dan pandemi tetap menjadi halangan dalam mencapai

pembangunan manusia yang berkelanjutan.

1. 2. Mendefinisikan Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia dapat didefinisikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, akses terhadap sumber daya, dan keamanan. Tujuan utama dari pembangunan manusia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia secara merata, menyeluruh, dan berkelanjutan. Konsep ini telah diakui secara internasional dan digunakan oleh berbagai organisasi untuk mengukur kemajuan pembangunan di berbagai negara (UNDP, 2016). Pembangunan manusia juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dimana setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama dalam meraih kesejahteraan (Haq, 1995).

Tidak hanya itu, pembangunan manusia juga turut serta dalam pengurangan kemiskinan, peningkatan kesetaraan gender, serta perlindungan hak asasi manusia. Peningkatan kesejahteraan manusia tidak hanya bergantung pada kemajuan ekonomi, tetapi juga pada pengembangan sumber daya manusia, peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan, dan pengurangan ketimpangan sosial dan ekonomi (UNDP, 2018). Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, upaya untuk mencapai pembangunan manusia harus diletakkan di tengah-tengah keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi (UNDP, 2018). Oleh karena itu, pembangunan manusia yang berkelanjutan harus mengatasi tantangan yang dihadapi, seperti perubahan iklim, kekeringan, dan bencana alam, seraya mempromosikan kesetaraan, inklusi, dan keadilan sosial.

Pembangunan manusia diartikan sebagai perluasan pilihan individu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan, pendidikan, kesehatan, dan hak-hak dasar lainnya (Sen, 1990). Konsep ini mengemuka sebagai alternatif dari indikator pembangunan yang hanya mengukur kemajuan ekonomi, seperti Produk Domestik Bruto (PDB). Pada konsep pembangunan manusia, keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari kemajuan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan individu untuk mengakses sumber daya dan memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak.

Perluasan pilihan individu terjadi ketika seseorang memiliki kemampuan untuk memilih cara hidup yang diinginkannya termasuk dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan pangan. Dalam konteks pembangunan manusia, perluasan pilihan ini didukung oleh peningkatan akses terhadap sumber daya seperti air bersih, sanitasi, dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Tujuan dari pembangunan manusia adalah meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat secara keseluruhan dengan memperluas pilihan mereka dalam mengakses sumber daya dan memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak (UNDP, 2015).

1. 3. Urgensi Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengevaluasi kemajuan dan kualitas hidup manusia di suatu negara (UNDP, 2023b). IPM didasarkan pada tiga dimensi utama yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. IPM memberikan informasi yang penting bagi pembuat kebijakan untuk mengembangkan kebijakan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Salah satu manfaat utama dari IPM adalah adanya keterbandingan antarnegara dalam hal kemajuan pembangunan manusia (UNDP, 2023a). Dengan membandingkan IPM antarnegara, perbedaan dalam kemajuan pembangunan manusia di seluruh dunia dapat dilihat dan dipahami dengan lebih mudah. Selain itu, IPM juga memungkinkan identifikasi masalah dan tantangan khusus yang dihadapi oleh negara tertentu dalam mencapai pembangunan manusia yang berkelanjutan. Dengan memperhatikan perbedaan dan masalah tersebut, pembuat kebijakan dapat mengembangkan kebijakan dan program yang lebih efektif untuk meningkatkan kemajuan pembangunan manusia di negara mereka.

Tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang lebih dikenal sebagai Sustainable Development Goals (SDG's) adalah sebuah rencana aksi global yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi bumi sebagai tempat tinggal manusia, dan memastikan bahwa semua orang memperoleh keadilan dan kemakmuran yang layak (United Nation, 2015). SDG's terdiri dari 17 tujuan yang secara komprehensif mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tujuan-tujuan tersebut menetapkan prioritas-prioritas global seperti mengurangi kemiskinan dan kelaparan, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta memperbaiki lingkungan hidup. Pembangunan manusia merupakan bagian integral dari SDG's dan merupakan tujuan yang berada pada inti dari pembangunan berkelanjutan. Pembangunan Manusia membawa konsep bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhitungkan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Untuk mencapai tujuan SDG's sekaligus mendorong pembangunan manusia, perlu adanya kerja sama antara pemerintah, organisasi internasional, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Tujuan SDG's yang kompleks dan ambisius memerlukan kolaborasi yang kuat di semua tingkat. Pembangunan manusia menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan dukungan pemerintah yang kuat untuk menciptakan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Menurut laporan PBB tentang SDG's, mempromosikan pembangunan manusia yang berkelanjutan memerlukan langkah-langkah konkret seperti memberikan akses yang lebih luas dan merata pada sumber daya seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Hal ini akan memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat memperoleh manfaat dari pembangunan dan keberhasilan pencapaian tujuan SDG's.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) memfokuskan kepada peningkatan kualitas hidup masyarakat dimana merupakan instrumen penting

dalam menjamin kelangsungan pembangunan nasional termasuk pembangunan manusia. Yaitu peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, perumahan, dan perlindungan sosial, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia secara keseluruhan (RPJMN 2020-2024, 2020).

1. 4. Dimensi dan Indikator Pembangunan Manusia

Pengukuran IPM di Indonesia mengacu pada tiga dimensi yang diperkenalkan UNDP pada tahun 1990. Ketiga dimensi itu terdiri dari umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Selain itu, Indonesia juga selalu melakukan penyesuaian metodologi sesuai dengan penyempurnaan yang dilakukan oleh UNDP. Mulai dari tahun 2015 hingga saat ini, Indonesia menggunakan metodologi terakhir yang disempurnakan oleh UNDP pada tahun 2014 sebagai standar penghitungan IPM.

Dalam mengacu pada standar UNDP, Indonesia melakukan penyesuaian pada indikator Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita (PPP) yang merupakan cerminan dimensi standar hidup yang layak karena tidak tersedia di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dan menggantikannya dengan indikator pengeluaran riil per kapita yang telah disesuaikan. Di sisi lain, penggantian indikator ini juga berdampak positif bagi hasil penghitungan IPM dimana pendapatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat tercermin melalui indikator tersebut. Pengeluaran riil per kapita yang telah disesuaikan dihitung menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) modul konsumsi bulan Maret, indeks harga konsumen, serta harga komoditas nonmakanan hasil survei harga konsumen.

Kemudian, Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) merupakan indikator yang merefleksikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. Penggunaan indikator ini didasarkan pada kenyataan bahwa umur panjang merupakan sesuatu yang tak ternilai dan dapat terwujud jikalau manusia mendapatkan nutrisi yang cukup dan kesehatan yang baik. Dilihat dari sisi definisi, UHH merupakan perkiraan rata-rata lamanya waktu yang dapat dijalani oleh seseorang selama hidupnya (dalam tahun). Metodologi penghitungan indikator ini adalah pendekatan tak langsung (indirect estimation) dan di standardisasi menggunakan standar penghitungan UNDP.

Dimensi terakhir adalah pengetahuan yang dicerminkan oleh indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Kedua indikator ini merupakan representasi dari kemampuan masyarakat dalam mengakses pendidikan formal. HLS menggambarkan kesempatan yang dimiliki masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan formal, sementara RLS menggambarkan tingkat pendidikan stok modal manusia dalam yang dimiliki oleh suatu wilayah. Penghitungan kedua indikator ini memanfaatkan data yang bersumber dari Susenas bulan Maret, data jumlah siswa yang menjalani pendidikan dengan bermukim dari Kementerian Agama, serta hasil inventarisasi data sektoral di kabupaten/kota.

BAB
2

Pembangunan Manusia
Di Tingkat Nasional

Pembangunan Manusia di Tingkat Nasional

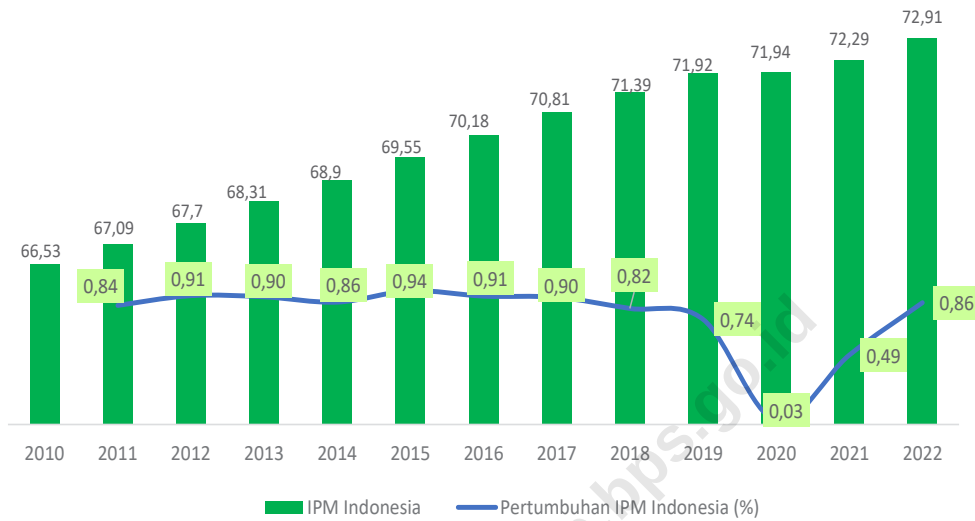
2.1. Pembangunan Manusia Indonesia di Masa Transisi Pandemi

Pada tahun 2020-2021 pandemi covid-19 melanda dunia, termasuk Indonesia didalamnya. Indonesia berjuang melawan Covid-19 dengan memodifikasi kebijakan karantina wilayah (lockdown) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Keterbatasan tersebut membuat manusia dipaksa untuk lebih kreatif dalam menyiasati keadaan yang ada. Kegiatan yang biasa dilakukan secara luar jaringan (luring), berubah menjadi dalam jaringan (daring) seperti work from home, school from home, bahkan shop from home. Perubahan ini tentunya berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia yang ada.

Memasuki tahun ketiga pandemi covid-19, situasi semakin terkendali. Pada tahun 2022, masyarakat semakin dapat beradaptasi dengan kondisi yang ada. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, tingkat kekebalan masyarakat mencapai 98,5 persen per Juli 2022, meningkat jika dibandingkan Desember 2021 yang hanya 87,8 persen. Kondisi yang membaik itu mendorong kebijakan PPKM semakin longgar hingga per 30 Desember 2022 PPKM sudah tidak diberlakukan lagi.

Sejalan dengan kondisi yang membaik, pada tahun 2022 IPM Indonesia mencapai 72,91, tumbuh 0,86 persen, lebih cepat dibanding tahun sebelumnya yang hanya 0,49 persen pada tahun 2021 dan 0,03 persen pada tahun 2020. Pertumbuhan pada tahun 2022 hampir menyamai rata-rata pertumbuhan IPM per tahun selama 2010-2019 atau periode sebelum pandemi COVID-19. Rata-rata pertumbuhan IPM 2010-2022 sebesar 0,77 persen.

Gambar 2.1. Tren IPM Indonesia, 2010-2022



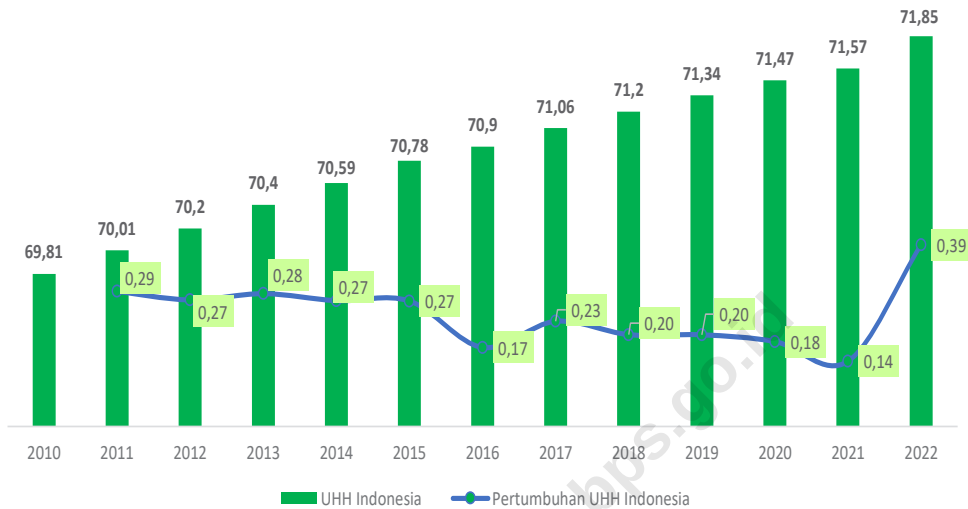
Sumber: Badan Pusat Statistik

2.2. Capaian Dimensi Umur Panjang dan Umur Sehat

Umur harapan hidup saat lahir direpresentasikan dengan indikator UHH (Umur Harapan Hidup) yang mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat yang mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Jika UHH meningkat maka derajat kesehatan penduduk juga meningkat. Bayi yang baru lahir mempunyai harapan untuk dapat menjalani hidup lebih panjang.

Capaian UHH Indonesia pada tahun 2022 sebesar 71,85 tahun, artinya anak yang lahir pada tahun 2022 diperkirakan dapat hidup hingga berumur 71,85 tahun. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, UHH mengalami peningkatan sebesar 0,28 tahun atau tumbuh sebesar 0,39 persen. Dalam 12 tahun terakhir, pertumbuhan UHH pada 2022 merupakan pertumbuhan tertinggi (Gambar 2.2). Pertumbuhan ini selaras dengan kondisi pandemi yang semakin membaik.

Gambar 2.2. Capaian dan Pertumbuhan UHH Indonesia, 2010-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik

Pengaruh derajat kesehatan individu dan komunitas disebabkan oleh banyak faktor. Menurut teori klasik H.L. Bloom, derajat kesehatan ditentukan oleh 40 persen faktor lingkungan, 30 persen faktor perilaku, 20 persen faktor pelayanan kesehatan, dan 10 persen faktor genetika (keturunan). Dari empat faktor tersebut, faktor lingkungan mempunyai kontribusi paling besar dalam mempengaruhi derajat kesehatan. Indikator yang dapat menggambarkan kondisi lingkungan antara lain indikator akses air minum layak dan fasilitas tempat buang air besar sendiri. Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak pada tahun 2022 adalah 91,05 persen, naik 0,27 persen dibandingkan tahun 2021. Demikian juga dengan persentase rumah tangga dengan fasilitas tempat buang air besar sendiri naik menjadi 86,06 persen dari 85,51 persen pada tahun sebelumnya (Statistik Kesejahteraan Rakyat 2022).

Selain itu, indikator yang dapat menggambarkan faktor perilaku antara lain perkawinan usia dini (berumur 16 tahun ke bawah) dan faktor pemanfaatan fasilitas Kesehatan. Pada tahun 2022, persentase wanita pernah kawin dengan umur perkawinan pertama 16 tahun ke bawah sebesar 14,15 persen. Persentase tersebut turun 0,76 persen dibandingkan tahun 2021. Sedangkan indikator persentase perempuan pernah kawin berusia 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan ada sebesar 90,21 persen, naik 1,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator di atas mengindikasikan bahwa risiko terhadap kesehatan ibu dan anak mulai mengalami perbaikan.

2.3. Capaian Dimensi Pengetahuan

Pada tahun 2022, penduduk 25 tahun keatas yang menjalankan Pendidikan formal di Indonesia ada sebesar 8,69 tahun, mengalami pertumbuhan sebesar 1,76 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Artinya secara rata-rata penduduk berumur 25 tahun keatas mengalami peningkatan penyelesaian pendidikan formal hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas VIII.

Sedangkan harapan lama sekolah Indonesia tahun 2022 yaitu 13,10 tahun yang artinya penduduk usia 7 tahun ke atas diharapkan dapat menyelesaikan pendidikan hingga level perguruan tinggi tahun pertama dengan kondisi aksesibilitas pendidikan yang stagnan atau tidak ada perubahan yang berarti. Angka ini naik 0,02 tahun dibandingkan tahun 2021. Pertumbuhan di tahun 2022, HLS hanya mampu tumbuh sebesar 0,15 persen yang artinya mengalami perlambatan yang disebabkan oleh naiknya angka putus sekolah di semua jenjang Pendidikan.

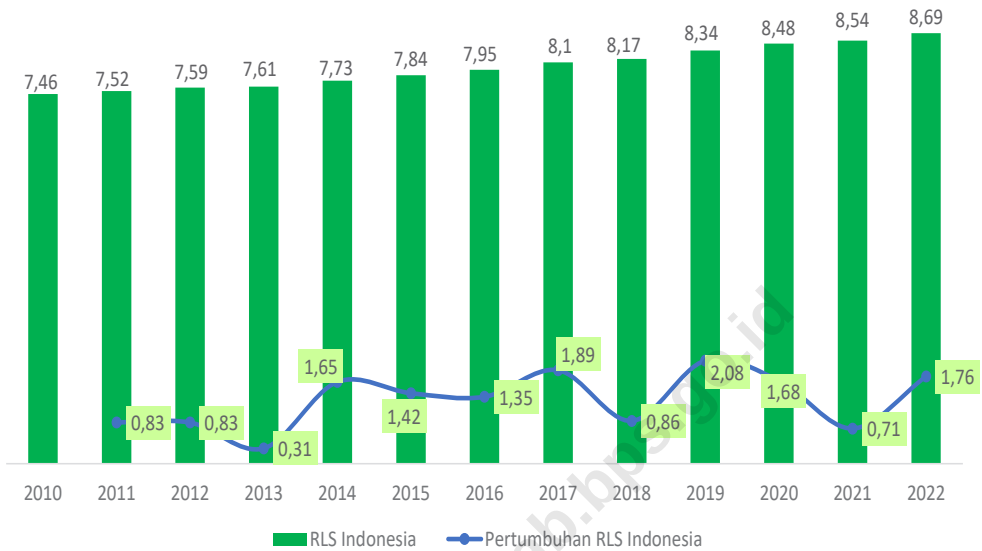
Angka putus sekolah semakin tinggi beriringan dengan semakin tingginya jenjang pendidikan. Jenjang SMA/Sederajat memiliki angka putus sekolah terbesar dibandingkan jenjang pendidikan di bawahnya, yakni sebesar 1,38 persen. Angka tersebut dapat diartikan bahwa pada jenjang SMA/Sederajat terdapat 13 dari 1.000 siswa yang putus sekolah. Meningkatnya angka putus sekolah dapat disebabkan oleh banyak faktor diantaranya faktor ekonomi, lingkungan, keluarga, sosial, dan kesehatan.

Gambar 2.3. Capaian dan Pertumbuhan HLS Indonesia, 2010-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 2.4. Capaian dan Pertumbuhan RLS Indonesia, 2010-2022

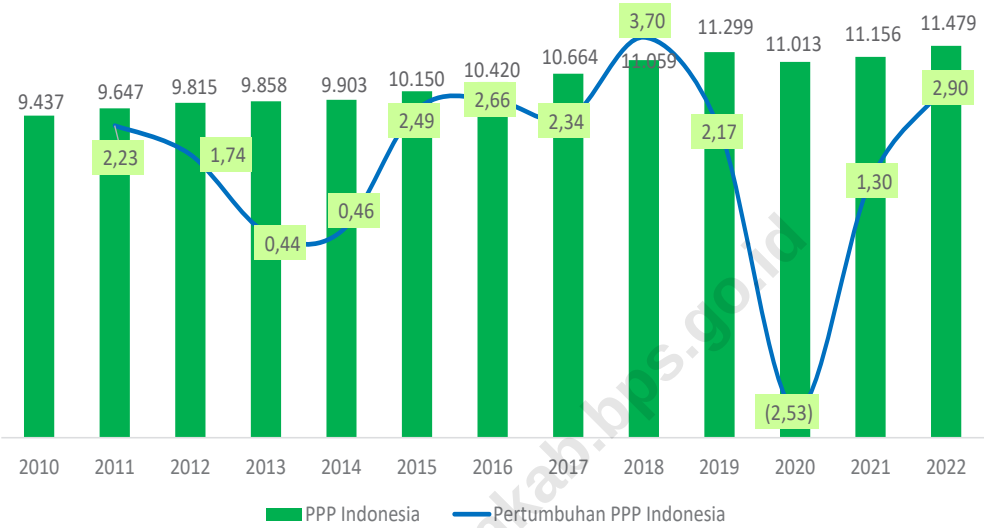


Sumber: Badan Pusat Statistik

2.4. Capaian Dimensi Standar Hidup Layak

Indikator yang mewakili dimensi standar hidup layak adalah indikator pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan. Indikator ini menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat selama periode tertentu. Pada tahun 2021, capaian indikator ini di Indonesia mengalami pemulihan pasca pandemi covid-19. Tahun 2021, capaian indikator ini mulai memulih menjadi 11.156.000 rupiah per tahun. Kemudian berlanjut di tahun 2022 dengan capaiannya menjadi 11.479.000 rupiah per tahun. Capaian tahun 2022 merupakan capaian tertinggi bahkan jauh melebihi capaian sebelum pandemi dengan pertumbuhan sebesar 2,90 persen.

Gambar 2.5. Capaian dan Pertumbuhan Pengeluaran Riil Perkapita Disesuaikan Indonesia, 2010-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik

Capaian ini didorong oleh beberapa faktor antara lain turunnya persentase penduduk miskin, turunnya tingkat pengangguran terbuka, meningkatnya jumlah penduduk bekerja, meningkatnya persentase pekerja formal, dan meningkatnya inflasi.

BAB
3

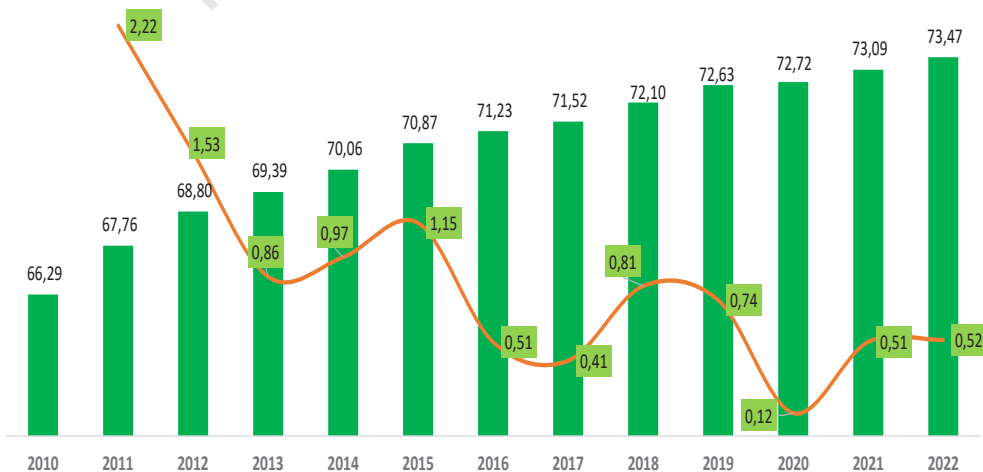
Pembangunan Manusia
Di Kabupaten Natuna

Pembangunan Manusia di Kabupaten Natuna

3.1. Indeks Pembangunan Manusia di Natuna

Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan perekonomian suatu wilayah. Pencapaian pembangunan manusia dapat dilihat dari kualitas manusia di wilayah tersebut. Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas manusia di suatu wilayah yaitu dengan cara Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Natuna pada tahun 2022 berada pada peringkat 4 di Provinsi Kepulauan Riau, yakni sebesar 73,47 dan bertumbuh sebesar 0,52 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 0,51 persen pada tahun 2021 dan 0,12 persen pada tahun 2020. Pada tahun 2010 sampai dengan 2022, status pembangunan manusia di Kabupaten Natuna mengalami perubahan yakni dari status ‘sedang’ menjadi ‘tinggi’. Hal ini dapat menjadi penyemangat bagi pemerintah Kabupaten Natuna dalam meningkatkan pembangunan manusia baik dari segi kesehatan, pengetahuan dan kualitas hidup yang layak.

Gambar 3.1. Capaian dan Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Natuna, 2010-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik ■ IPM Natuna — Pertumbuhan IPM Natuna

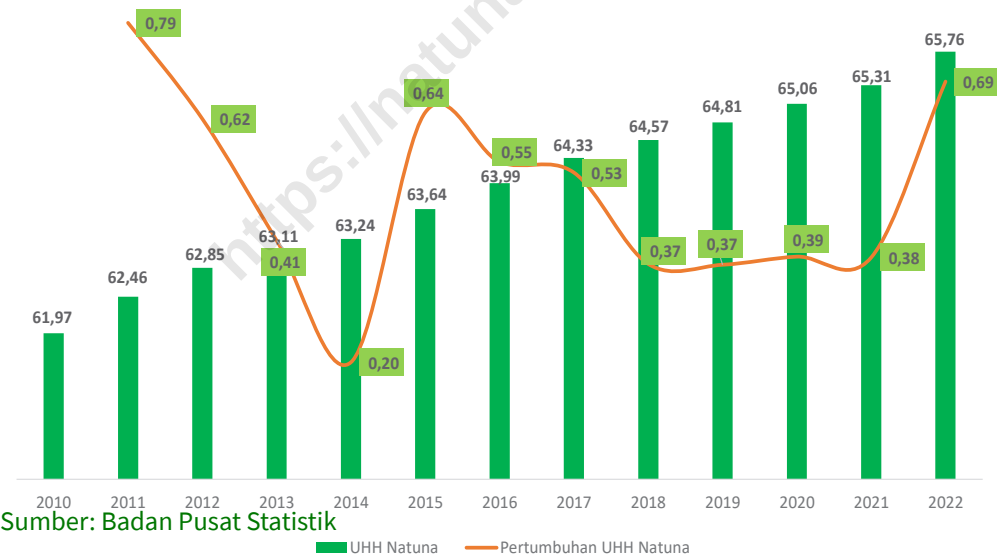
Indeks Pembangunan manusia (IPM) disusun oleh 3 dimensi, yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan kualitas hidup yang layak. Setiap dimensi memberikan

kontribusi yang sangat besar dalam peningkatan IPM.

3.2. Capaian Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat Natuna

Representasi dari dimensi umur yang panjang adalah angka harapan hidup. Angka harapan hidup menggambarkan seberapa lama peluang seseorang untuk bertahan hidup dari pertama kali dilahirkan. Semakin tinggi indikator harapan hidup mencerminkan semakin tingginya derajat kesehatan di suatu daerah baik dari sarana prasarana, akses hingga kualitas kesehatan. Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Natuna mengalami peningkatan dari tahun 2010 hingga tahun 2022. Pada tahun 2022 UHH Natuna mengalami pertumbuhan yang signifikan yaitu sebesar 0,69 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 0,38 persen pada tahun 2021 dan 0,39 persen pada tahun 2020. Pada tahun 2022 UHH Kabupaten Natuna sebesar 65,76. Hal ini berarti bahwa bayi yang baru lahir memiliki harapan hidup selama 65,76 tahun.

Gambar 3.2. Capaian dan Pertumbuhan Umur Harapan Hidup Natuna, 2010-2022

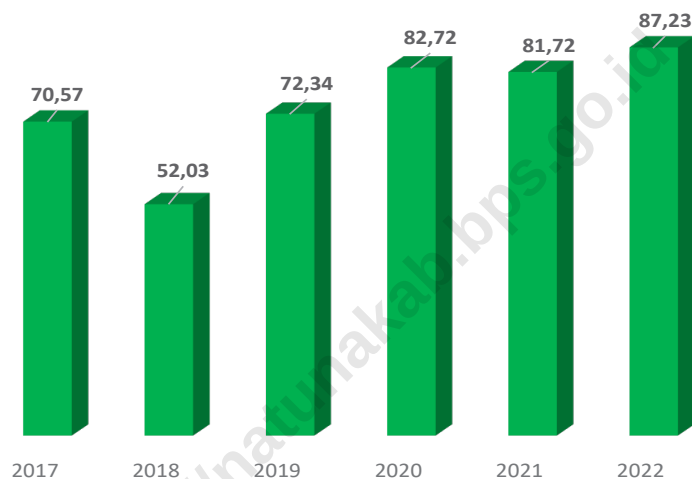


Derajat kesehatan atau kondisi kesehatan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu faktor lingkungan sebesar 40 persen, faktor perilaku sebesar 30 persen, faktor pelayanan kesehatan sebesar 20 persen dan faktor keturunan (genetika) sebesar 10 persen.

Faktor lingkungan yang mempunyai kontribusi paling besar dalam mempengaruhi derajat kesehatan, tercermin melalui kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan yang dimaksud yaitu tersedianya akses air minum layak dan fasilitas tempat buang air besar sendiri. Pada tahun 2022, persentase rumah tangga dengan akses air minum layak sebesar 87,23 persen,

naik 5,51 persen dibandingkan dengan tahun 2021. Demikian pada tahun 2022, persentase rumah tangga dengan fasilitas tempat buang air besar sendiri naik menjadi 94,80 persen dari 91,99 persen pada tahun 2021. Walaupun demikian, Pemerintah Kabupaten Natuna masih mengupayakan pengembangan sistem penyediaan air minum layak dan pemberian bantuan pembangunan fasilitas buang air besar.

Gambar 3.3. Rumahtangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak di Natuna, 2017-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik

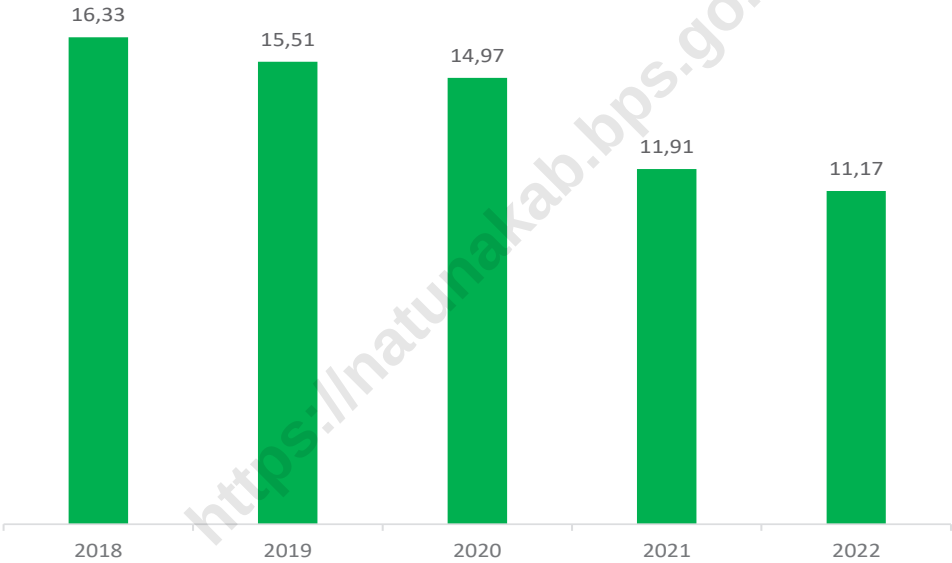
Gambar 3.4. Rumahtangga yang Memiliki Fasilitas Buang Air Besar di Natuna, 2017-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik

Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan adalah faktor perilaku. Faktor perilaku dapat tercermin melalui perkawinan usia dini (berumur 16 tahun ke bawah). Persentase wanita pernah kawin dengan umur kawin pertama ≤ 16 tahun pada tahun 2018 sampai tahun 2022 mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2022 persentase wanita pernah kawin dengan umur kawin pertama ≤ 16 tahun sebesar 11,17 persen, menurun sebesar 0,74 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan persentase pernikahan dini sebagai sinyal positif terhadap semakin membaiknya kualitas kesehatan bayi.

Gambar 3.5. Persentase Wanita Pernah Kawin dengan Umur kawin Pertama ≤ 16 Tahun di Natuna, 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas

Faktor pelayanan kesehatan merupakan jumlah tenaga kesehatan Kabupaten Natuna dari tahun 2019 sampai tahun 2022 mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2022 jumlah tenaga kesehatan sebesar 800 jiwa, meningkat sebesar 295 jiwa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Keberadaan tenaga kesehatan telah tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Natuna, sehingga masyarakat khususnya bayi mendapatkan konsultasi kesehatan.

Tabel 3.1. Jumlah Tenaga Kesehatan Natuna, 2019-2022

Tahun	Dokter	Perawat	Bidan	Ahli Gizi	Farmasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2019	45	249	153	36	22
2020	38	208	167	37	24
2021	44	221	191	44	31
2022	69	368	260	59	44

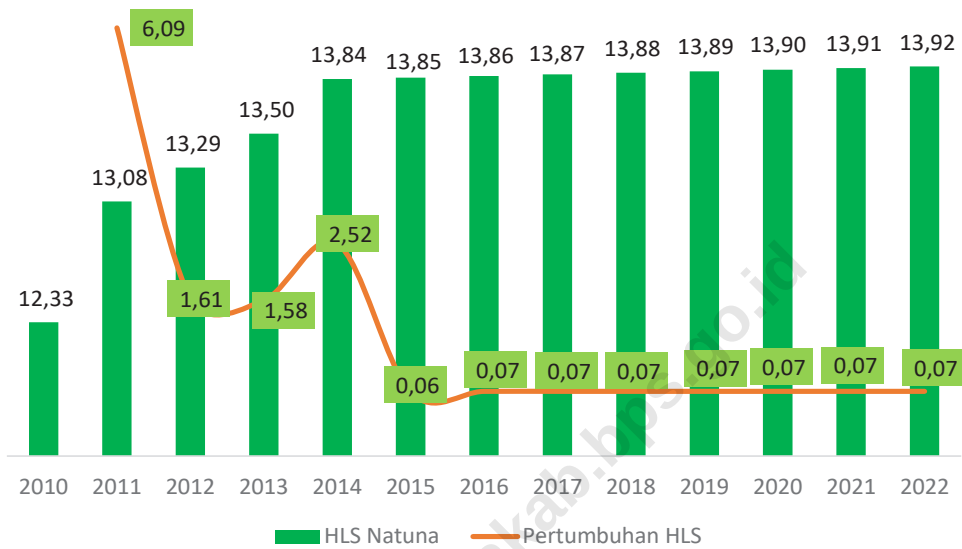
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna

3.3. Capaian Dimensi Pengetahuan Natuna

Indikator penyusun dimensi pengetahuan yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berumur 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. RLS digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Sementara itu, HLS adalah harapan jumlah tahun lamanya sekolah yang akan dijalani oleh anak usia 7 tahun di masa mendatang. HLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk jumlah tahun lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Pada tahun 2022 angka harapan lama sekolah Kabupaten Natuna adalah 13,92 tahun. Artinya bahwa penduduk usia 7 tahun keatas diharapkan dapat menyelesaikan pendidikan hingga level perguruan tinggi tahun pertama dengan kondisi aksesibilitas pendidikan yang stagnan atau tidak ada perubahan yang berarti. Angka naik 0,01 tahun dibandingkan tahun 2021.

Pada tahun 2022, rata-rata lama sekolah penduduk berumur 25 tahun ke atas di Kabupaten Natuna adalah 8,96 tahun. Artinya bahwa rata-rata penduduk berumur 25 tahun ke atas menyelesaikan pendidikannya hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas VIII. Dibandingkan tahun 2021, rata-rata lama sekolah tahun 2022 tumbuh sebesar 0,45 persen.

Gambar 3.6. Capaian dan Pertumbuhan Harapan Lama Sekolah (HLS) Natuna, 2010-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik

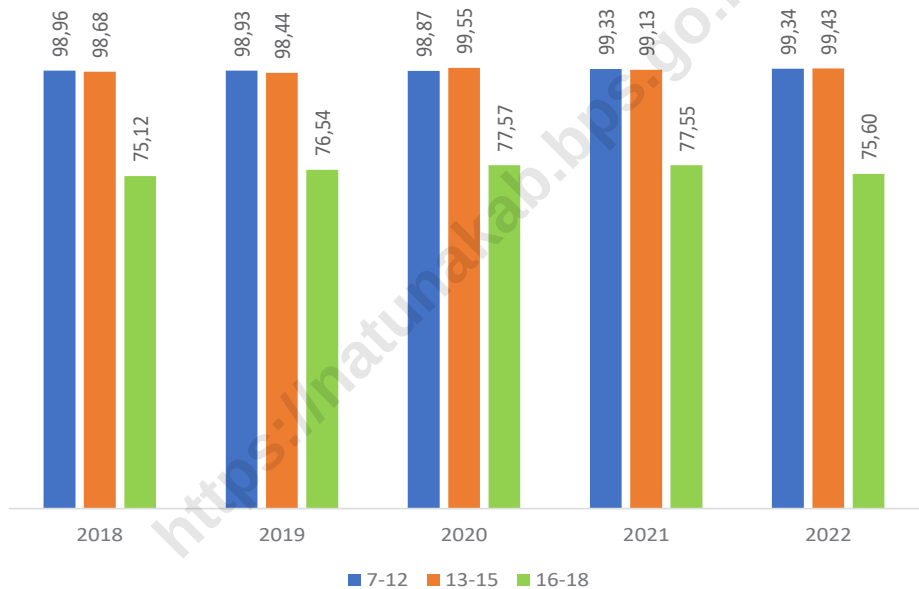
Gambar 3.7. Capaian dan Pertumbuhan Rata-Rata Lama Sekolah Natuna, 2010-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik

Nilai HLS dan RLS dipengaruhi oleh pergerakan nilai Angka partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Semakin besar nilai APS, APK dan APM suatu wilayah, maka akan semakin bagus kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di wilayah tersebut. Pada tahun 2021 – 2022 persentase nilai APS sudah cukup baik. Pada tahun 2022 APS Kabupaten Natuna pada kelompok umur 7-12 tahun sebesar 99,34 persen, umur 13 – 15 tahun sebesar 99,43 persen dan umur 16 – 18 tahun sebesar 75,60 persen. Dengan nilai APS mendekati 100 persen menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum.

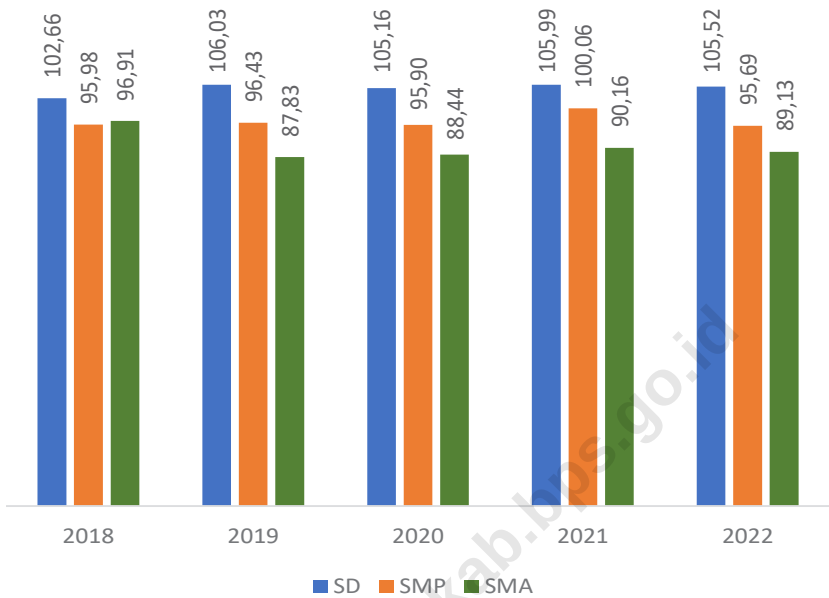
Gambar 3.8. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Natuna, 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas

Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Natuna selama dua tahun terakhir mengalami penurunan pada setiap jenjang pendidikan. Dimana pada tahun 2022 persentase APK pada jenjang pendidikan SD/ sederajat sebesar 105,52 persen, SMP/ sederajat sebesar 95,69 persen dan SMA/ sederajat sebesar 89,13 persen. Berbeda halnya dengan Angka Partisipasi Murni (APM) kabupaten Natuna pada tahun 2021 – 2022 stagnan atau tidak ada perubahan yang berarti. Pada tahun 2022 APM Kabupaten Natuna pada jenjang pendidikan SD/ sederajat sebesar 99,08 persen, SMP/ sederajat sebesar 91,83 persen dan SMA/ sederajat sebesar 72,08 persen.

Gambar 3.9. Angka Partisipasi Kasar (APK) Natuna, 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas

Gambar 3.10. Angka Partisipasi Murni (APM) Natuna, 2018-2022

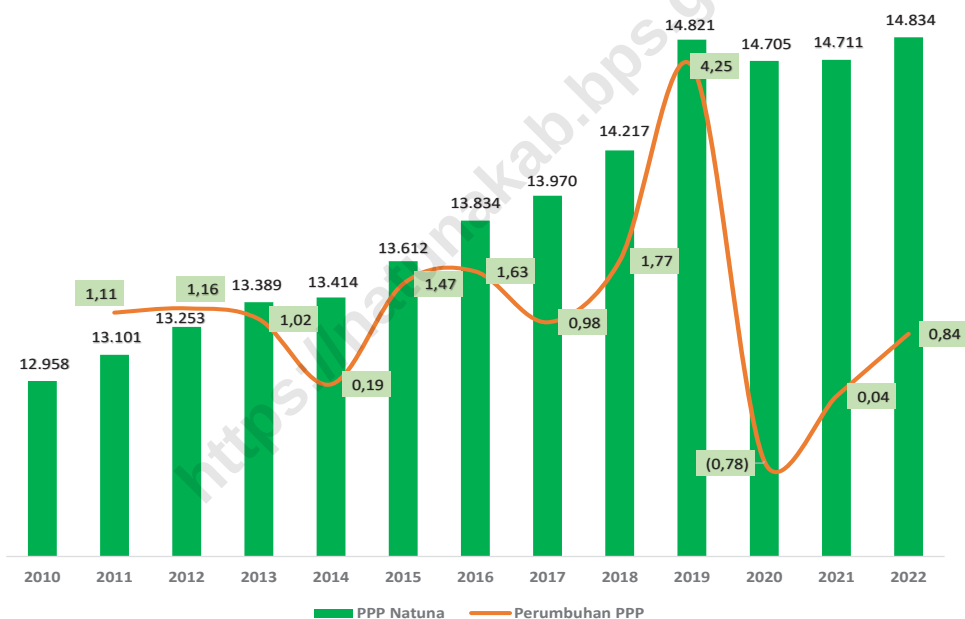


Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas

3.4. Capaian Dimensi Standar Hidup Layak Natuna

Indikator yang mewakili dimensi standar hidup layak adalah indikator pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan. Indikator ini menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat selama periode tertentu. Pada tahun 2010 – 2022 pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan Kabupaten Natuna mengalami peningkatan sebesar Rp 1.876.000,00. Pada tahun 2022 pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan sebesar Rp 14.834.000,00 per tahun. Capaian tahun 2022 merupakan capaian tertinggi selama 12 (dua belas) tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,14 persen per tahun.

Gambar 3.11. Capaian dan Pertumbuhan Pengeluaran Riil Per Kapita (PPP) yang Disesuaikan di Natuna, 2010-2022



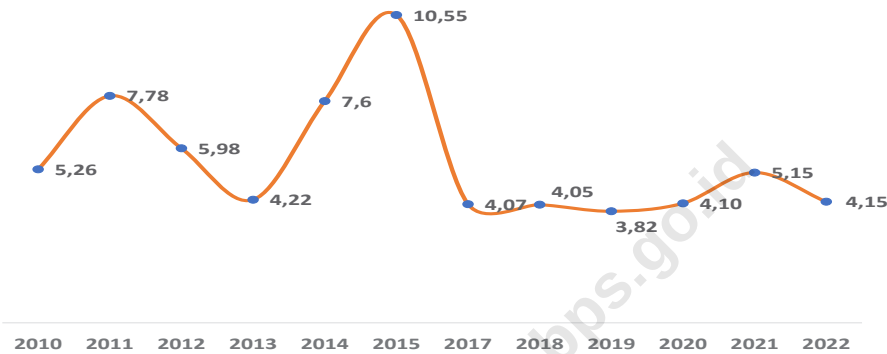
Sumber: Badan Pusat Statistik

Banyak faktor yang mempengaruhi capaian dimensi standar hidup layak dengan indikator pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Diantaranya persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, jumlah penduduk bekerja, persentase pekerja formal.

Pada awal pandemi terjadi, banyak penduduk kehilangan pekerjaan seiring pembatasan dan penutupan beberapa sektor ekonomi. Akibatnya, pekerja kekurangan jam kerja dan lapangan pekerjaan, penawaran barang dan jasa menurun dan produsen mengurangi faktor produksi seperti tenaga kerja sehingga terjadi pengangguran. Peningkatan pengangguran ini terlihat semenjak pandemi covid-19 meningkat ditahun

2020-2021. Aktivitas masyarakat masih terikat dengan kebijakan yang harus melakukan vaksinasi 1-2 kali dan masih adanya rasa kurang percaya dan ketakutan yang dirasakan oleh masyarakat akibat wabah pandemi covid-19.

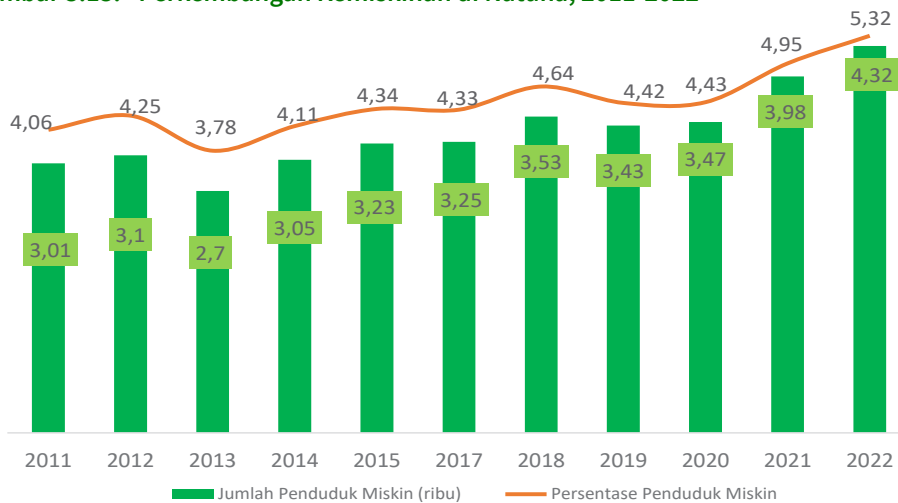
Gambar 3.12. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Natuna, 2010-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas

Indikator yang menggambarkan kondisi ketenagakerjaan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT merupakan persentase jumlah penduduk pengangguran terhadap jumlah angkatan kerjanya. Indikator ini menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Tahun 2022 TPT Kabupaten Natuna sebesar 4,15 persen mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni 5,15 persen.

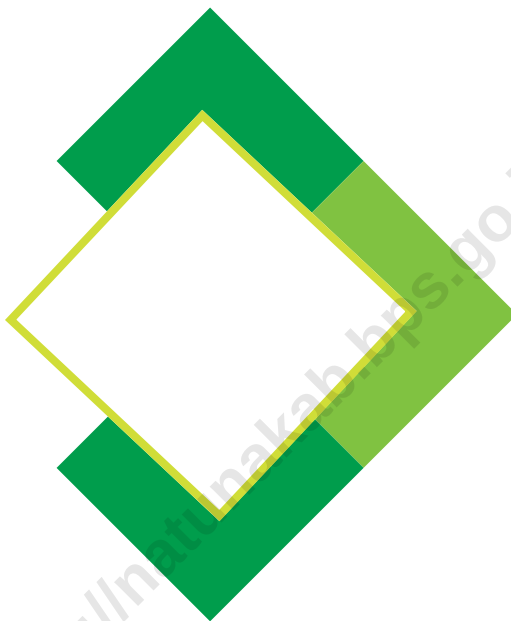
Gambar 3.13. Perkembangan Kemiskinan di Natuna, 2011-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas

Tetapi hal ini tidak sejalan dengan pergerakan kemiskinan. Dimana persentase penduduk miskin pada tahun 2022 mengalami peningkatan mencapai 5,32 persen. Hal ini bisa saja terjadi dikarenakan ketidakseimbangan pasar tenaga kerja yang kapasitas mencari pekerjaan alternatif bagi si miskin kurang tersedia atau upah yang diberikan masih rendah. Dan fenomena ini memberikan ketimpangan pendapatan di Natuna mengalami penurunan yang diwakili oleh gini rasio sebesar 0,291.

<https://natunakab.bps.go.id>



<https://natunakab.go.id>

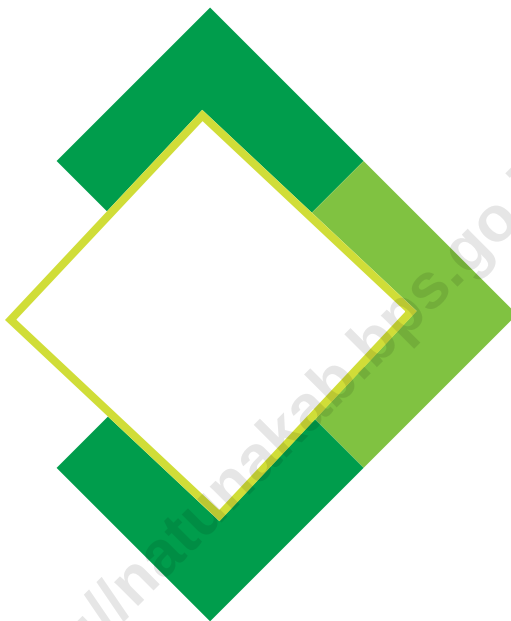
Lampiran



<https://natunakab.bps.go.id>

Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia, 2021-2022

Dimensi Umur Panjang dan Umur Sehat			
Angka Kesakitan	%	5,24	24,10
Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	%	81,72	87,23
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar	%	8,01	5,20
Wanita Pernah Kawin dengan Umur Kawin Pertama $\leq$ 16 tahun	%	11,91	11,17
Wanita Pernah Kawin yang Proses Melahirkan Terakhirnya Bukan Ditolong oleh Tenaga Medis	%	4,47	12,90
Wanita Pernah Kawin yang Proses Melahirkan Terakhirnya Bukan di Fasilitas Kesehatan	%	24,43	27,36
Dimensi Pengetahuan			
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	%	105,99	105,52
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	%	100,06	95,69
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA	%	90,16	89,13
Angka Partisipasi Murni (APM) SD	%	99,02	99,08
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	%	91,82	91,83
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA	%	72,11	72,08
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 th	%	99,33	99,34
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 th	%	99,13	99,43
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 th	%	77,55	75,60
Dimensi Standar Hidup Layak			
TPT	%	5,15	4,15
Penduduk Bekerja	Orang	40.343	38.927
Pekerja Formal	%	45,26	46,55
Pekerja Informal	%	54,74	53,45
Penduduk Miskin	%	4,95	5,32
Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Rp	3,98	4,32
Gini Rasio	%	0,30	0,29

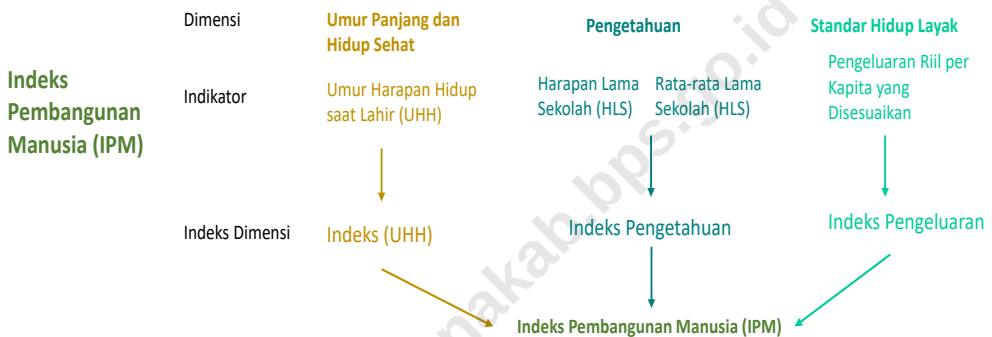


CATATAN TEKNIS



Catatan Teknis

Diagram Penghitungan IPM



Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi umur panjang dan hidup sehat, digunakan indikator umur harapan hidup saat lahir. Selanjutnya, untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi standar hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli. Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran riil per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk standar hidup layak.

Umur Harapan Hidup saat Lahir

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Penghitungan umur harapan hidup melalui pendekatan tidak langsung (indirect estimation). Jenis data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Paket program Mortpack digunakan untuk menghitung angka harapan hidup berdasarkan input data ALH dan AMH. Selanjutnya, dipilih metode Trussel dengan model West, yang sesuai dengan histori kependudukan dan kondisi Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara umumnya (Preston, 2004).

Pengetahuan

Salah satu komponen pembentuk IPM adalah dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini, indikator yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) dan harapan lama sekolah (*expected years of schooling*). Pada proses penghitungan IPM, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah diberi bobot yang sama, kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pengetahuan sebagai salah satu komponen pembentuk IPM. Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh anak yang berusia 7 tahun.

Standar Hidup Layak

Dimensi ketiga dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purcashing power parity*) berbasis formula Rao:

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{\frac{1}{m}}$$

Keterangan:

PPP_j : paritas daya beli di wilayah j

p_{ij} : harga komoditas i di kabupaten/kota j

p_{ik} : harga komoditas i di Jakarta Selatan

m : jumlah komoditas

Penghitungan paritas daya beli dilakukan berdasarkan 96 komoditas kebutuhan pokok seperti terlihat dalam Table L1.

Tabel L.1. Komoditi Kebutuhan Pokok sebagai Dasar Hitung Paritas Daya Beli/ Purchasing Power Parity (PPP)

Nama Komoditas	Nama Komoditas	Nama Komoditas
Beras	Pisang Lainnya	Rokok kretek tanpa filter
Tepung terigu	Pepaya	Rokok putih
Ketela pohon/ singkong	Minyak kelapa	Rumah sendiri/ bebas sewa
Kentang	Minyak goreng lainnya	Rumah kontrak
Tongkol/tuna/ cakalang	Kelapa	Rumah sewa
Kembung	Gula pasir	Rumah dinas
Bandeng	Teh	Listrik
Mujair	Kopi	Air PAM
Mas	Garam	LPG
Lele	Kecap	Minyak tanah
Ikan segar lainnya	Penyedap makanan/vetsin	Lainnya/batu baterai,aki,ko-rek,obat nyamuk,dll
Daging sapi	Mie instan	Perlengkapan mandi
Daging ayam ras	Roti manis/ roti lainnya	Barang kecantikan
Daging ayam kampung	Kue kering	Perawatan kulit,muka,kuku,rambut
Telur ayam ras	Kue basah	Sabun cuci
Susu kental manis	Makanan gorengan	Biaya RS Pemerintah
Susu bubuk	Gado-gado/ ketoprak	Biaya RS Swasta
Susu bubuk bayi	Nasi campur/rames	Puskesmas/pustu
Bayam	Nasi goreng	Praktik dokter/ poliklinik
Kangkung	Nasi putih	SPP
Kacang panjang	Lontong/ketupat sayur	Bensin
Bawang merah	Soto/gule/sop/ rawon/cincang	Transportasi/ pengangkutan umum
Bawang putih	Sate/tongseng	Pos dan Telekomunikasi
Cabe merah	Mie bakso/mie rebus/ mie goreng	Pakaian jadi laki-laki dewasa
Cabe rawit	Makanan ringan anak	Pakaian jadi perempuan dewasa
Tahu	Ikan (goreng/ bakar dll)	Pakaian jadi anak-anak
Tempe	Ayam/daging (goreng dll)	Alas kaki

Jeruk	Makanan jadi lainnya	Minyak Pelumas
Mangga	Air kemasan galon	Meubel air
Salak	Minuman jadi lainnya	Peralatan rumah tangga
Pisang ambon	Es lainnya	Peralatan perabot rumah tangga
Pisang raja	Rokok kretek filter	Alat-alat Dapur/ Makan

Penyusunan Indeks

Sebelum menghitung IPM, setiap komponen IPM harus dihitung indeksnya. Formula yang digunakan dalam penghitungan indeks komponen IPM adalah sebagai berikut:

$$I_{UHH} = \frac{UHH - UHH_{min}}{UHH_{maks} - UHH_{min}}$$

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{pengetahuan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$$

Tabel L.2. Nilai Maksimum dan Minimum per Komponen

Komponen IPM	Satuan	Minimum	Maksimum
Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH)	Tahun	20	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	15
Pengeluaran per Kapita	Rupiah	1.007.436*	26.572.352**

Keterangan:

* Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua

** Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

Mengagregasikan Indeks Dimensi Untuk Menghasilkan IPM

IPM dihitung sebagai rata-rata ukur (geometrik) dari tiga indeks dimensi:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{UHH} \times I_{pengetahuan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

Status Pembangunan Manusia

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal capaian pembangunan manusia.

1. Kelompok “sangat tinggi”: $IPM \geq 80$
2. Kelompok “tinggi”: $70 \leq IPM < 80$
3. Kelompok “sedang”: $60 \leq IPM < 70$
4. Kelompok “rendah”: $IPM < 60$

Pertumbuhan IPM

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara perubahan capaian terkini dengan capaian tahun sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan IPM, maka semakin cepat pula peningkatan IPM. Indikator pertumbuhan IPM ini dapat digunakan sebagai kinerja pembangunan manusia suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{IPM_t - IPM_{t-1}}{IPM_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

IPM_t : IPM suatu wilayah pada tahun t

$IPM_{(t-1)}$: IPM suatu wilayah pada tahun $(t-1)$

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**Badan Pusat Statistik
Kabupaten Natuna**

JL. HR. Soebrantas -Sual Rt.01 Rw.05 Kelurahan Ranai
Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, 29783
Website: natunakab.bps.go.id Email: bps2103@bps.go.id

